

Perbarindo

Dari: Perbarindo (mailto:perbarindo.org)
Kepada: importhr_hari@yahoo.com
Tanggal: Jumat, 25 April 2025 pukul 08:41 GMT+7



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA
No 5398/OCG/PP-PERBARINDO/IV/2025

Kepada Yth,
PT BPR SRI PARTHA BALI
Jalan Mohamed Yamin No 7 Denpasar

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (LTT) tahun 2024 dari PT BPR SRI PARTHA BALI dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah pengakuan bahwa Laporan Tata Kelola (LTT) yang diterima dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 25 April 2025

PERBARINDO



TANDA TERIMA
No 5398/OCG/Media-BPR/IV/2025

Kepada Yth,
PT BPR SRI PARTHA BALI
Jalan Mohamed Yamin No 7 Denpasar

KETERANGAN

MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (LTT) tahun 2024 dari PT BPR SRI PARTHA BALI dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah pengakuan bahwa Laporan Tata Kelola (LTT) yang diterima dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 25 April 2025

MediaBPR-PERBARINDO

No. : 031/BPR.SP/IV.01/2025
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yth :
DPP Perbarindo dan MediaBPR
Komplek PATRA II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-4261445/6

Perihal : Laporan Transparansi PT BPR Sri Partha Bali Tahun 2024

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, berikut kami kirimkan Laporan Transparansi BPR Sri Partha Bali Tahun 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Denpasar, 21 April 2025
PT BPR Sri Partha Bali



I Made Marlan, SE
Direktur Kepatuhan

Tembusan Yth :
1. Dewan Komisaris.
2. Arsip.

Tanda Bukti Kirim

Applikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sri Partha Bali

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

932663-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-601046-
17042025152548

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

sripartha_bank@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-17 15:25:48



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR SRI PARTHA BALI
TAHUN 2024**



**Jl. Prof Moh Yamin No 7 Denpasar
TELEPON: 0361 4746844**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Sri Partha Bali
Alamat	Jln. Prof Moh Yamin No 7 Renon Denpasar
Nomor Telepon	(031) 4746844

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Sri Partha Bali pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Sri Partha Bali memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Sri Partha Bali dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Denpasar. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Sri Partha Bali didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Sri Partha Bali.

BPR Sri Partha Bali telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Sri Partha Bali selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sri Partha Bali terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR Sri Partha Bali telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	I Made Suardika SH
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama:		
1.		a. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku
2.		b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
3.		c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
4.		d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan
5.		e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6.		f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai
7.		g. Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif.
8.		h. Memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
9.		i. Memastikan Bank memiliki Kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif.
10.		j. Memastikan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank
11.		k. Bertanggungjawab atas keputusan pelaksanaan ketentuan peraturan OJK
2.	Nama	I Made Marlan SE
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan :		
1.		a. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku
2.		b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
3.		c. Menetapkan langkah - langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang
4.		d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK
5.		e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan
6.		f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
7.		g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai
8.		h. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif

- i. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APUPPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan PPPSPM
- j. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APUPPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional bank
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan /peraturan yang berlaku
- d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak covid-19 sudah dilaksanakan
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sesuai dateline
- f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing
- g. penerapan APUPPT PPPSPM telah dilaksanakan dimasing - masing bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Memastikan Bank memiliki Kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif.
- i. Memastikan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank
- j. Bertanggungjawab atas keputusan pelaksanaan ketentuan peraturan OJK

Nihil

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :		
<ul style="list-style-type: none">a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.d. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-		

undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.

g. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

h. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR

i. Memberikan persetujuan, pengawasan, dan mengevaluasi kebijakan prosedur penerapan program APUPPT dan PPPSPM

j. Memastikan Bank memiliki kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif

k. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal dalam proses pelaporan keuangan Bank

l. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2.

Nama

Ida Ayu Puspawati SE

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.
- g. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
- h. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR
- i. Memberikan persetujuan, pengawasan, dan mengevaluasi kebijakan prosedur penerapan program APUPPT dan PPPSPM
- j. Memastikan Bank memiliki kebijakan Strategi Anti Fraud dan memastikan penerapan SAF berjalan dengan efektif
- k. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal dalam proses pelaporan keuangan Bank
- l. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap

kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara Konsisten dan Penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan kredit
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan
- d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindak lanjuti sesuai dateline yang ditentukan
- e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan, dan dicontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang
- f. Memastikan terlaksananya penerapan APUPPT terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

PT BPR Sri Partha Bali tidak membentuk komite karena modal inti dibawah 50M

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Made Marlan SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Komisaris Utama memiliki saham 40% di PT BPR Sri Partha Bali

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Made Marlan SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat Kepimilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan pemegang Saham pada kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Ashi
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
2.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Pusaka
	Persentase Kepemilikan (%)	40,00
3.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Antenk
	Persentase Kepemilikan (%)	37,50
4.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Tish
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00

Komisaris Utama memiliki saham di 4 BPR lainnya yang masih 1 Group dengan BPR Sri Partha Bali

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

2.	Nama	I Made Marlan SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

2.	Nama	I Nyoman Dhasmiartha MBA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
3.	Nama	Ni Wayan Yuniarthi SE MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada
4.	Nama	I Wayan Gatha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	tidak ada

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham di PT BPR Sri Partha Bali

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Made Suardika SH
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Made Marlan SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, Ni Wayan Yuniarthy SEMM - Kakak Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
2.	Nama	Ida Ayu Puspawati SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	I Made Meiarthayasa MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, Ni Wayan Yuniarthy SEMM - Kakak Kandung, I
2.	Nama	Wulan Dwi Astuti SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

		Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
2.	Nama	I Nyoman Dhasmiartha MBA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Kakak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Kakak Kandung, Ni Wayan Yuniarthi SE MM - Kakak Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
3.	Nama	Ni Wayan Yuniarthi SE MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Adik Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Adik Kandung, I Nyoman Dhasmiartha MBA - Adik Kandung, I Wayan Gatha - Orang Tua Kandung
4.	Nama	I Wayan Gatha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Anak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Made Meiarthayasa MBA - Anak Kandung, I Nyoman Dhasmiartha MBA - Anak Kandung, Ni Wayan Yuniarthi SE MM - Anak Kandung

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR dan Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp317.990.400
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp269.848.800
--	----------------------

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
--	----------------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Direksi dan Dewan Komisaris hanya memiliki paket remunerasi berupa Gaji yang didalamnya sudah termasuk Dakes.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	2,33 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,44 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,22 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,27 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	3,02 : 1
-------------	----------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	05 Januari 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan Desember 2023		
2.	Tanggal Rapat	03 April 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan Maret 2024		
3.	Tanggal Rapat	03 Mei 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Evaluasi hasil kerja sampai dengan April 2024, dan langkah langkah yang akan dilakukan selama 6 bulan kedepan.		
4.	Tanggal Rapat	07 Juni 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan terkait penyampaian kinerja sampai dengan bulan Mei 2024 dan pembahasan mengenai tindak lanjut saran dan solusi yang telah diberikan		
5.	Tanggal Rapat	03 Juli 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan terkait penyampaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2024		
6.	Tanggal Rapat	02 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan terkait penyampaian kinerja sampai dengan bulan Juli 2024		

7.	Tanggal Rapat	08 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan terkait penyampaian kinerja sampai dengan bulan September 2024 dan pembahasan surat dari OJK tentang penggabungan, saran saran dan solusi.		
8.	Tanggal Rapat	06 Desember 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
penyampaian evaluasi hasil kerja sampai dengan November 2024 dan saran saran dewan komisaris		

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan 8 kali dalam setahun

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Made Meiarthayasa MBA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	8 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ida Ayu Puspawati SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	8 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Anggota Dewan Komisaris selalu hadir dan tepat waktu saat pelaksanaan rapat

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak ada penyimpangan internal (Fraud) yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang	0 kasus

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2024

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2024 di BPR Sri Partha Bali tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	26 Februari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pecalang
	Penjelasan Kegiatan	By Pengamanan Nyepi
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	01 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Alas Arum Batur
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Dalem Tanjung Bungkak
	Jumlah (Rp)	Rp200.000

4.	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Khayangan Sumertha
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Ulun Danu Beratan
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	22 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Mandara Giri Semeru Agung
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	09 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Bukit Mentik
	Jumlah (Rp)	Rp1.400.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	17 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Dalem Tanjung Bungkak
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	19 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Jagat Nata
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	19 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ketua STT
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Kupon Bazaar Br. Ketapean
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	26 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Penataran Sumerta
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Kupon Pura Khayangan Desa Sumerta
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	11 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bendahara Pura
	Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Geger
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	24 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ketua Yayasan
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan ke yayasan Tat Twam Asi

Jumlah (Rp)	Rp2.400.000
15. Tanggal Pelaksanaan	24 Desember 2024
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Ketua Yayasan
Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Ke Yayasan Dharma
Jumlah (Rp)	Rp2.400.000
16. Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2024
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Bendahara Pura
Penjelasan Kegiatan	Dana Punia Di Pura Sakenan
Jumlah (Rp)	Rp50.000

PT BPR Sri Partha Bali menyediakan dana CSR untuk kegiatan sosial

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR SRI PARTHA BALI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Denpasar, 20 Maret 2025

PT BPR SRI PARTHA BALI



I Made Suardika, SH
Direktur Utama



I Made Meiarthayasa, MBA
Komisaris Utama